

MAHASISWA MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN

Nurhadi

ASM BSI

Jl. Kamal Raya No.18, RingRoad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

email: nurhadi_BSI@yahoo.com

Abstract

Candradimuka mean is Candradimuka Crater, where the son of the milky tetuka forget and galvanijed into a mighty gathukaca. That proverbial student crater candra dimuka placeslike indonesia and process of studen to become leaders of idonesia. this organization such as the candradimuka while cadres like ghatukaca.

That imageis symbolic when in face, the cadres of the muslim students association as larfanpane, ahmad tirtosudiro,dahlan ranumiharja, sulastomo, marie muh ammad, jusuf kalla, aniswati, akbar tanjung, urbaningrum annas and others displays the important things, and development organizationdoctrine of struggle students recruitmen muslim student association student developmen student association, fascination student prospect ahead for student organization and students view of islam figures. Equippmen with the five doctrines of islamic thought indonesia memory explanation on islam, sunnahand the prophet tafseer purpose, tafser indepence student association,and the NDP (core value struggle). Character development of the nation's first, both make the country focus on its national interests and make the nation's third century chalengest facing indonesia compatible 21 sustained competitive advantage by mastering sciebce and teknologi and qualivied humand resources. Student association took step sconsolidate the organization and insight as follows: streghten the base (back to campust), rather than an ideological paradigma profesionalism, consolidation, increase performance. In an effort to consolidate and raise the image of student is carry out activities such as character development of the nation throught recruitmen improve the quality of human resources with themastery of science and tehnologi and others. Student association is very noble goal, about to realize the human ideal. Is the ideal goal of human beings who have a 5 kualita with 17 indicators. Establish a cadre of air students association of the faith, air science,and air amal according to the mandate.

Keywords: state administration, student asociation, nationalism, democratization, primordialism, arts, civil society

I. PENDAHULUAN

Multikrisis yang melanda Indonesia saat ini berakar dari lemahnya leadership pemerintahan. Sebagian besar masyarakat menilai sudah waktunya terjadi perubahan mendasar di segala lini. Hal ini diperlukan agar rakyat bisa memperoleh hak-hak dasar dan kehidupan yang layak. Untuk itu, mundurnya kepemimpinan adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi.

Keniscayaan itu semakin mendesak mengingat rezim pemerintah tidak memu menjalankan amanah konstitusi UUD pasal 31 mengenai hak pendidikan rakyat. Pemerintahan tidak mampu menciptakan pendidikan gratis, berkualitas dan bebas korupsi. Alih-alih menjamin hak-hak pendidikan rakyat, pemerintah malah

menjadikannya sebagai komoditas yang hanya menguntungkan segelintir orang. Visi pendidikan yang mustinya menjadi tanggungjawab negara untuk memanusiakan manusia, malah justru menjadikan rakyat Indonesia teralienasi dan kehilangan jati dirinya. Pelajar, pekerja, mahasiswa dan kaum muda menyerukan pemimpin mundur karena gagal menegakkan cita-cita reformasi sekarang telah gagal memerintah, gagal membangun, gagal membasmi korupsi, dan gagal mendidik rakyatnya. Pemimpin tidak amanah dan telah menyengsarakan rakyat.

Seluruh elemen mahasiswa mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak mewujudkan perubahan Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan aksi pada tanggal 2 Mei 2011 (Hari Pendidikan Nasional) untuk menyuarakan suara hati

nurani rakyat. Jika memang pemimpin bangsa sudah tidak mampu mengemban amanahnya, maka saatnya kita mencari alternatif bersama-sama demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Sesungguhnya kami mengimpikan sebuah bangsa sejahtera yang adil bagi seluruh rakyatnya. Kami mencita-citakan sebuah kepemimpinan bangsa yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan-kepentingan asing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Nasionalisme, Demokratisasi, dan Identitas Primordialisme di Indonesia.

Penomena nasionalisme di Indonesia dengan segenap problematikanya saat ini menjadi sebuah bahan kajian yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Salah satu aspek yang cukup penting di dalamnya adalah menyangkut hubungan antara nasionalisme dengan fenomena kebangkitan sentimen primordialisme di era demokratisasi. Hal ini karena tidak dapat dimungkiri bahwa semangat kembali kenilai-nilai primordial dirasakan makin tumbuh dan menguat setelah reformasi berlangsung. Persoalan kebangkitan sentimen primordialisme, baik dalam ekspresi keetnisan maupun keagamaan, penting untuk dipahami sebab eksistensi nasionalisme sebagai sumber semangat untuk mempersatukan keragaman masyarakat dan seluruh teritorial bangsa, dapat goyah ketika sentimen primordial menguat dan menunjukkan ekspresi perlawanannya.

Di samping itu, karena nasionalisme pada dasarnya bukanlah ideologi yang bersifat final pada dirinya, sebagai cita-cita dan kesepakatan kolektif yang bersifat imajiner tentang masa depan yang lahir dari refleksi atas masa lalu dan masa kini, ia perlu dikelola, dirawat dan diperbaharui, agar tetap relevan pada setiap jaman. Bagi negara-negara Indonesia yang besar, berkepulauan yang luas, dan multikultural, kebutuhan akan pengelolaan, perawatan, dan pembaharuan terus menerus atas imajinasi nasionalisme itu menjadi penting. Persoalannya bukan karena hanya pertumbuhan ide Nasionalitas pada mulanya bersifat elitis, melainkan juga karena dasar-dasar bagi nasionalitas itu sendirinya relatif longgar, yakni ide persatuan segenap unsur-

unsur bangsa yang berbeda secara etnik, agama, daerah, dan ideologi.

Hakikat nasionalisme Indonesia dengan menjawab pertanyaan besar yakni bagaimana kita memaknai eksistensi Indonesia di era demokratisasi. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, permasalahan yang ditelusuri secara lebih spesifik adalah:

Pertama, menyangkut hubungan antara nasionalisme, demokratisasi, dan kebangkitan sentimen primordial di Indonesia saat ini. Dalam hal ini akan dikaji secara teoritis pola hubungan antara ketiganya terutama keterkaitannya antara demokratisasi dan kebangkitan identitas primordial, persoalan pengelolaan negara dengan keutuhan bangsa, dan hubungan antara kebangsaan dan *primordialisme*.

Ruang Lingkup Administrasi Negara

Menurut Soewarno (2000,1) membatasi "Administrasi negara adalah salah satu bagian dari pada administrasi umum, yang merupakan salah satu cabang ilmu sosial (*social science*) dimana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan sekelompok ilmu-ilmu sosial lainnya".

Artinya bagian dari pada proses politik, dimana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan/partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaannya dapat negara dapat diselenggarakan. Demikian pula proses administrasi merupakan bagian yang integral dari pada proses politik suatu bangsa. Menurut Leonard et al (2002:3) membatasi bahwa "administrasi negara adalah atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara". Artinya hubungan dengan tindakannya terhadap kenyataan-kenyataan tertentu sesuai dengan tujuan jangka panjang, dalam sistem administrasi negara dirumuskan sebagai keseluruhan dari pada perundang-undangan, peraturan-peraturan praktek-praktek penyelenggara, hubungan-hubungan, kode-kode, dan adat-adat kebiasaan yang berlaku pada setiap waktu dalam setiap daerah wewenangnya (*jurisdiction*) untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara.

Menurut Herbert membatasi (2000:54) "administrasi negara adalah kegiatan-

kegiatan dari pada bagian-bagian badan eksekutif pemerintahan nasional, negara bagian, pemerintah daerah, dewan-dewan dan panitia-panitia yang dibentuk oleh kongres; dan badan pembuat undang-undang bagian negara; perusahaan-perusahaan negara; dan badan-bada kenegaraan lain yang mempunyai ciri yang khusus”.

Menurut Dimock et al (2001:22) membatasi “administrasi negara adalah kegiatan dari pada negara dalam melaksanakan kekuasaan politik”

Berdasarkan konsep administrasi politik yang terdiri atas politik dan administrasi dalam administrasi pemerintah dapat dikemukakan pengertian sebagai berikut:

1. Tugas politik ialah menetapkan kebijaksanaan politik pemerintah adapun aparatur pemerintah yang bertugas menetapkan kebijaksanaan ini ialah pejabat negara yang duduk dalam pemerintah yang disebut *administrator* dalam politik (*political administrator*). Pejabat negara yang duduk dalam pemerintahan ialah persiden (perdana menteri) dan para menteri. Mereka hanya menentukan kebijaksanaan pemerintahan.
2. Tugas administrasi ialah merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dari pada kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun aparatur pemerintah yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan ini ialah pejabat pemerintah profesional, yang disebut administrator profesi (*profesional administrator*), mereka pada umumnya adalah pejabat-pejabat pemerintah yang bekerja pada suatu departemen teknis, yang secara fungsional mempunyai keahlian pada substansi teknisnya masing-masing.
3. Administrasi dari pada pemerintah (*the administration of government*) sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Charles, berarti juga penerapan manajemen dan menentukan haluan dari pada badan eksekutif (pemerintah).

Nasionalisme dan Mahasiswa di Indonesia

Nasionalisme dalam pengertian kita dewasa ini masih relatif muda dan timbul dalam bagian kedua abad 18 di Eropa manifestasinya pertamanya yang besar adalah revolusi Perancis, tetapi sejak saat ini menyebar ke seluruh dunia barat. Sejak

akhir abad ke 19 dan selanjutnya dalam abad ke 20 nasionalisme telah pula menyebar keseluruh dunia khususnya amerika latin, Asia dan Afrika.

Berlainan dengan miskonsepsi umum, nasionalisme bukan mata-mata suatu pengertian politik melainkan juga merupakan suatu pengertian ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Pendeknya, nasionalisme merupakan suatu pengertian sejarah karena itu kiranya pendekatan sejarah terhadap nasionalisme merupakan pendekatan yang paling mencakup berdasarkan itu semua.

Hans Kohn (1665:456) seorang sejarawan ahli nasionalisme mendefinisikan “nasionalisme adalah suatu tata pikir dan tata rasa, yang meresapi mayoritas terbesar sesuatu rakyat dan menganggap dirinya meresapi semua anggota rakyat itu”.

Nasionalisme mengakui negara nasional sebagai bentuk ideal organisasi politik dan menganggap nasionalitas sebagai sumber bagi segala tenaga budaya yang kreatif serta kesentosan ekonom. Karena itu kesetiaan tertinggi manusia harus ditunjukkan kepada nasionalitasnya, karena hidup itu sendiri disangka berakar didalamnya dan dimungkinkan oleh kesejahteraannya.

Nasionalisme adalah suatu ide yang mengisi otak dan hati manusia dengan pikiran baru dan perasaan baru dan yang mendorong untuk menterjemahkan kesadarannya kedalam tindakan yang beraksi yang diorganisasi. Karena itu nasionalitas bukan semata-mata suatu kelompok yang ikut dan dijiwai oleh kesadaran bersama, melainkan juga merupakan suatu kelompok yang menginginkan mengungkapkan dirinya ke dalam apa yang dianggap bentuk tertinggi yang dianggap kegiatan yang terorganisasi yakni suatu negara yang berdaulat.

Radikalisme dalam Seni

Seni pada aksi unjuk rasa turun jalan. Prolog: seni dan perubahan, untuk (si) apa Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat, karya seni selalu mendapat empat yang cukup menentukan dalam mensosialisasikan dan membangun pandangan perubahan secara tidak langsung. Kedudukan masyarakat yang hingga kini masih bertingkat-tingkat, dapat dilihat masing-masing tingkatan mempunyai

keadaan sosial kultural yang berbeda-beda pula.

Pada pemerintahan rezim orde baru, sejak pembantaian rakyat yang dimulai tahun 1965 menyebabkan muncul pandangan di kalangan rakyat bahwa berpolitik sangat berbahaya. Pandangan ini juga berimbas pada dunia seni, kalangan seniman juga tidak sedikit turun dibantai pada peristiwa itu. Pemerintahan rezim orde baru melakukan depolitisasi dalam semua lini kehidupan, bahwa seni tidak berpolitik yang menyebabkan seniman kritis takut dibantai oleh masyarakat itu diorganisir oleh kepentingan militer pada saat itu. Hal ini menyebabkan trauma berpolitik rakyat yang berkepanjangan.

Pada masa orde baru bukan berarti tidak ada seniman yang berkarya tentang kehidupan rakyat, namun yang menjadi soal adalah tidak adanya keberpihakan seniman atas rakyat, sebagai akibat trauma politik. Seni yang berbicara rakyat tanpa keberpihakan artinya tanpa ideologi yang diperjuangkan. Dampak sebagai akibat dari represivitas pemerintahan rezim militer orde baru terhadap demokrasi dan perkembangan kesenian masih terasa sampai sekarang. Perkembangannya kemudian pembuatan karya seni seakan menjadi monopoli dari kaum yang bisa disebut seniman yang terlihat melahirkan karya-karya seni jauh dari kenyataan kehidupan masyarakat sekitarnya, seniman, karya seni menjadi mempunyai jarak dan terasing pada kehidupan rakyat, terutama rakyat kecil.

Apa yang dikemukakan ini terlihat dari perkembangannya yang terpilih, seni pada aksi dikemukakan ini terlihat dari perkembangannya yang terpilih, seni pada aksi protes turun di jalan mempunyai keunikan arah perkembangan sendiri. Ada beberapa alasan digunakannya seni pada aksi protes turun ke jalan;

1. Kebutuhan aktivis atas media menyampaikan kritik dan kesadaran pembebasan dan lewat karya seni masyarakat diajak untuk lebih menyadari keadaan yang sebenarnya terjadi.
2. Seni sangat mudah dimasuki kepentingan-kepentingan politik dari kepentingan ideologi menurut garis politik yang dianut oleh perancangannya.
3. Seni mempunyai sifat laten, dalam hal ini berbentuk seni yang paling sering ditiru-tiru bahkan dipalsu sehingga penyebaran apa yang hendak disampaikan menjadi cepat menjadi legitimasi publik;

4. Seni mudah digunakan (oleh beberapa aktivis) sebagai *entry point* untuk memasuki lingkungan masyarakat yang untuk selanjutnya diorganisir untuk kepentingan politik.

Jika ditelusuri sebenarnya penggunaan karya seni sebagai alat perubahan sudah dilakukan sejak lama. Pada penyebaran Islam di tanah Jawa, digunakan wayang kulit yang menyertakan ajaran-ajaran Islam. Pada masa penjajahan, kolonial belanda memfungsikan seni sebagai hadiah para raja untuk melobi perdagangan, misalnya pada tahun 1629 lukisan pemandangan pelabuhan amsterdam dihadiahkan paa sultan palembang oleh belanda. Pada masa revolusi kemerdekaan, karya seni digunakan sebagai media propaganda. Pada tahun 1945 didaerah lawang jawa timur, rakyat membuat gambaran moral di dinding-dinding kota, yang menyuarakan bahaya *fasisme, imperialisme* dan perlawanan hidup atau mati terdapat tentara belanda. Seniman-seniman LEKRA pada masa pemerintahan bungkar juga menggunakan karya seni untuk memperjuangkan rakyat dengan mengangkat tema-tema kehidupan rakyat kecil (buruh dan tani).

Demokrasi dan Kemiskinan

Saat ini Indonesia tengah memasuki masa transisi dengan isu demokrasi sebagai salah satu wacana pemerintahan dan bernegara. Sebetulnya, perbedaannya antara demokrasi dan pembangunan bukan lah hal yang baru. Akan tetapi, pada dekade terakhir ini, kita menyaksikan dengan lebih jelas hubungan antara keduanya. Hubungan ini terilustrasikan melalui area interaksi yang penting antara actor internasional-organisasi *multilateral* dan *bilateral* serta lembaga donor internasional- dengan agen-agen pembangunan dinegara berkembang yaitu berupa aliran dana, baik dana bantuan maupun pinjaman untuk mendorong gerakan *civil society*, demokrasi, dan *good governance* di Negara bersangkutan. Fenomena ini merefleksikan suatu perubahan yang oleh Adrian leftwich (1993:603) disebut dengan "*new orthodoxy of democracy*".

Dalam pandangan ini, demokrasi lebih dipandang sebagai cara (*mean*) dari pada tujuan (*ends*) pembangunan.

Demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi dan terbangunnya institusi-institusi penghubung kelompok miskin

untuk mempengaruhi dan membangun kebijakan Negara sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkait erat dengan hal ini, demokratisasi menjadi prasarat utama untuk mengurangi kemiskinan. Kelahiran "*new orthodoxy of democracy*" ini ditandai dengan kelahiran *good governance* yang sangat didukung oleh bank dunia dan komunitas donor internasional. Fenomena ini pula yang menandai maraknya "indusrti demokrasi" atau "kelompok-kelompok demokrasi dan *governance*" diberbagai tingkatan.

Isu "*politic of aid*" kerap kali menyertai pembahasan mengenai "*new orthodoxy of democracy*" misalnya, *good governance* yang kental dengan prinsip demokrasi menjadi prasarat utama yang diterapkan oleh lembaga internasional bagi Negara penerima dana bantuan. Hal ini dimungkinkan melalui *political conditionaly* sebagai hasil perubahan dari *economic conditionaly* yang diterapkan sebelumnya. Kritik yang paling ekstrim muncul ketika proyek *political conditionaly* atau dengan kata lain program *good governance* menjadi upaya yang lebih jelas mengutamakan dan memasukan agenda bagaimana mengatur suatu pemerintahan untuk kemudian mengakomodasi kepentingan neoliberal dan pasar bebas. Definisikan yang diajukan Douglas menyimpulkan bahwa pada akhirnya "*democracy is a way of penetrating the political system down to a grass roots levels*".

Seperti hal demokrasi, *civil society* juga merupakan wacana politik. Oleh karena itu, kekhawatiran terbesar dalam praktis demokrasi terjadi ketika ada harapan yang berlebihan terhadap arti *civil society* yang dikaitkan dengan perbedaan relasi kekuasaan (*power relation*). *Civil society* bukanlah komunitas yang homogeny. Didalamnya terdapat perbedaan relasi kekuasaan, pertarungan terhadap pengambilan keputusan, dan sumber daya ekonomi yang menempatkan kelompok miskin sebagai focus pembahasan dan selalu dianggap sebagai kelompok yang *powerless*.

Kritik memperlihatkan bahwa demokrasi cenderung mengundang hegemoni antar masyarakat yang memiliki berbagai sumber daya –baik politik sosial, maupun ekonomi– cenderung mendominasi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Para pengikut *post-marxist*, misalnya sangat pesimis terhadap arti *civil society is merely a site for discrimination*

and *opperession*". Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh Hearn (1999) di Afrika Selatan memperlihatkan kekhawatiran terhadap dampak "praktik demokrasi" terhadap kaum miskin. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok miskin justru mengalami *dual oppression* yaitu dari Negara dan elite kapitalis dalam struktural masyarakat atau aliansi antara Negara serta kelompok borjuis.

New orthodoxy of democracy yaitu kelompok *good governance* terhadap kelompok miskin supaya potensinya untuk melibatkan kelompok miskin tetap terjadi tetapi kemungkinan dual operation tidak terjadi. Dengan demikian memberikan refleksi kepada para praktisi agr upaya-upaya ini dapat berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi kelompok miskin dan mampu mengurangi kendala-kendala yang mempengaruhi kerentanan (*vulnerability*) kelompok miskin.

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan dua pendekatan penelitian yakni studi literatur dan pengambilan kesimpulan.

1. Studi literatur

Studi literatur dilakukan membaca buku literatur tentang studi kasus dan buku referensi serta pendekatan terhadap omawa dilingkungan perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Selain itu juga melakukan pencarian data di internet maupun media masa/elektronik dan jurnal (data sekunder yang bersifat kualitatif) yang diperoleh melalui gejolak politik dalam negeri dalam aksi/aspirasi mahasiswa/senat.

2. Pengambilan kesimpulan

Setelah proses analisa telah selesai dilakukan, maka dilakukan pengambil kesimpulan dari analisa data literatur dilakukan sebelumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alangkah indahnya bila perguruan tinggi bersinergi dengan alumninya. Alumni dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dan tantangan yang mungkin terjadi di luar tembok kampus. Informasi semacam itu menjadi masukan yang amat

berarti bagi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan yang akan datang. Ini menjadi sekaligus menjadi bekal yang amat berharga bagi mahasiswa yang memasuki masa selanjutnya, dunia nyata yang ada di luar kampus.

Alumni bersama pengurus organisasinya akan menjadi mitra yang andal dalam membantu manajemen PTS/PTN menapakan transformasi multidimensi, baik akibat berbagai tuntutan dari dalam maupun luar sistem pendidikan tinggi. Itu karena seperti kita ketahui tekanan perkembangan teknologi, internasionalisasi, dan tuntutan reformasi dan berbagai aspek menimbulkan berbagai reaksi diantara sivitas akademika yang memerlukan usaha dengan pradigma baru. Perubahan merupakan gejala umum yang terdapat dalam organisasi apa saja seperti diamati oleh Friedman (1999). Pengamatannya menunjukkan bahwa respon terhadap tantangan itu merupakan kontinum dari amat yang antusias untuk menggunakan teknologi dan komunikasi 24 jam sehari, dengan intensitas yang tinggi, melewati semua zona waktu dunia sampai ke yang amat antiglobalisasi dan ingin menghentikan proses globalisasi itu. Meskipun reaksi kampus tidak seekstrim yang disebut terakhir, namun dalam bentuknya lainnya, ada indikasi sebagian civitas akademika menunjukkan ketidak nyamana terhadap kemajuan teknologi dan globalisasi dengan segala dampaknya. Hal ini tampaknya dengan prilaku yang menutup diri terhadap perubahan struktural (*structural adjusmen*). Kehilangan kepercayaan diri untuk berkompetesi, kecendrungan hanya melihat kedalam (*inward looking*), meningkatnya gejala mekanisme bela diri (*devense mechanism*) dan proyeksi.

Apa yang mestinya terjadi? dalam proses globalisasi dunia, perguruan tinggi perlu memanfaatkan peluang, merelisasikan visinya. PTS/PTN harus mampu menjawab tantangan, terutama menghadapi era perdagangan bebas. Kita harus mengarahkan kuantitas dan kualitas dharma kita untuk menjawab tantangan global. Dengan demikian perkembangan yang sedang akan berlangsung di dunia yang menyempit itu, tidak dapat diabaikan.

Alumni sebagai wahana sensor (*sensing device*) perlu bekerja erat dengan sistem kelembagaan almameternya. Masukkan dari alumni tentang apa yang terjadi di luar kampus perlu direspons

dengan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam program kampus. Sebaliknya, kampus juga perlu menjadi bengkel *after sales service* bagi alumni yang memerlukannya. Siklus proses renewal alumni almameter ini harus berjalan secara kontiniu, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan.

Tengoklah menjelang kelahiran era reformasi. Saat itu yang menonjol adalah peranan perguruan tinggi tidak mempunyai kekuatan dan sumber daya fisik yang cukup untuk mendorong perubahan itu, ia (dipelopori mahasiswa) mengambil posisi sebagai *moral force* dalam dalam mendorong terjadinya reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manajemen civitas akademik dan alumni bersatu dalam memberikan sumbangan maksimal untuk terjadinya perubahan tatanan makro.

Sekarang, sesudah reformasi bergulir, peran ini semertinya tetap dipertahankan, dalam bentuk lain. Kita mesti mendorong dan berperan aktif dalam kelahiran indonesia baru yang dicita-citakan: beradab bersatu, demokratis, adil dan makmur. Perjalanan ini masih jauh tetapi tetapi kita harus menyatukan diri melindungi berbagai pemikiran sehat untuk menjadi kebijaksanaan dalam menapaki era baru itu. suara alumni harus merupakan amplifikasi suara kampus dan perlu diintensifkan. Semua perguruan tinggi mengalami situasi kompetitif yang lebih berat dalam mendaftarkan sumberdaya. Kompetesi itu terjadi pada setiap tingkat dan sektor, termasuk kompetisi didalam perguruan tinggi itu sendiri.

Pada tahun 1997, setelah 52 tahun merdeka, Indonesia memiliki 76 perguruan tinggi negeri dan 1.558 perguruan tinggi swasta (Depdikbud, 2000). Jumlah ini tiap saat bertambah terus. Pertumbuhan kuantitatif perguruan tinggi ini didorong oleh tuntutan sosial masyarakat yang terus menerus meningkat serta tuntutan objektif akan kuantitas dan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi untuk bekerja diberbagai jenis lapangan pekerjaan. Ini berarti kita perlu mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk berkompetensi. Kemampuan ini akan dapat kita peroleh jika terjadi sinergi diantara semua potensi kampus, termasuk alumuninya.

Kita menukik PTN, akan kelihatan bahwa dalam kehidupan institusional perguruan tinggi ini, dihadapkan pada

berbagai tantangan kualitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Kita juga masih menghadapi masalah untuk melakukan allighmen diantara unit, program, bahkan, dalam visi dan misinya. Belum lagi budget yang terbatas dan nilainya makin hari makin turun. Semua orang berbicara tentang efesiensi, tetapi juga perlu dipikirkan *how low can we go?* Sebab, jika melampaui ambang tetentu, dapat menjadi kontraproduktif. Belum lagi keperluan untuk memperhatikan kultural dan sejarah yang diberberapa bagian perlu dilestarikan, namun juga ada yang perlu diubah.

Dalam situasi demikian, kita perlu memperdayakan alumni. Pemberdayaan atau *empowerment* dalam pengertian aslinya merupakan sebuah kata yang ada hubungannya dengan penindasan, yang ditindas dan yang menindas atau paling tidak yang dikuasai dan yang menguasai. Dalam hubungan ini pemberdayaan berarti memberikan power yang lebih besar kepada yang dikuasai. Sepanjang sejarah, kelihatannya tidak pernah terjadi PTN/PTS menguasai alumninya. Jadi, sebenarnya istilah pemberdayaan untuk fungsi alumni, jika dihubungkan dengan pengertian ini, tidak telalu tepat. Mungkin yang tepat adalah meningkatkan partisipasi. pengertian pemberdayaan yang lain adalah membangun kapasitas (*capaciti building*) sehingga subjek tersebut dapat berdaya atau mempunyai kekuatan untuk berbuat. Dalam pengertian inilah, perlu dipikirkan bagaimana alumni melakukan pemberdayaan untuk mendukung almamaternya.

Partisipasi dan kepedulian alumni dalam perkembangan almamaternya dari hari kehari perlu dimaksimalkan. Peranan ini amat penting, karena seperti disampaikan sebelumnya alumni merupakan sumber balikan dalam usaha perbaikan dari program yang dilaksanakan PTN/PT. Mereka merupakan ujung tombak "pemasaran" PTN/PTS dan humas yang sangat baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Taylor dan Massy (1996) memasuka alumninya sebagai indikator strategi dalam melihat dalam melihat kemajuan perguruan tinggi. Maju tidaknya suatu PTS/PTN dapat dilihat dari seberapa jauh alumni berperan memberikan kontribusi dan dukungan terhadap terealisasinya misi almamaternya. Namun dalam observasinya Taylor Massy itu, ternyata alumni hanya membantu almamaternya secara intensif hanya jika itu mempunyai kebanggaan terhadap

almamaternya. Itu sebabnya PTN/PTS yang murah dan bergengsi sukar memperoleh bantuan dan alumninya. Mereka mengatakan: *"fifts from alumni....perhap reflecing relatevely greater giving capacity by graduates of more prestgous institutions by their graduates..... capacity and attachmen of non-alumni is greater than that of alumni in lower cost and lower prestige institutions."*

Melihat argumentasi itu, paling tidak ada dua strategi besar yang dapat dilakukan untuk memberdayakan alumni.

1. Menanamkan kecintaan dan rasa berterima kasih kepada almameter dengan berbagai cara, menyelenggarakan kegiatan *home coming*, mengorganisasikan alumni yang mempunyai kapasitas besar untuk memberikan sumbanga (dalam arti luas) kepada PTN/PTS, dan meningkatkan insentisitas kontak antara alumni dan almameter. Selain itu, menggerakkan alumni untuk meningkatkan karya dengan mencantumkan identitas alumninya, dan memperkuat organisasi alumnini sehingga dapat mempunyai akses keberbagai lembaga masyarakat, meningkatkan bantuan alumni kepada alumni baru dalam mencapai pekerjaan dan perkembangan profesional mereka. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan agar solidaritas alumni ini tidak mempunyai ekses dekstruktif dan alumni menjadi almameter *chauvinist*, karena perguruan tinggi adalah masyarakat ilmiah.
2. Memperbaiki mutu PTS/PTN sehingga alumni dapat merasa bangga akan PT nya. Perbaikan ini memerlukan berbagai kondisi, antara lain juga partisipasi alumni, strategi pemasaran yang baik dari PTS/PTN. Perbaikan mutu harus dibarengi dengan akuntabilitas PTS/PTN terhadap masyarakat.

Kedua hal itu merupakan siklus spiral yang tak berujung, yang harus bergerak secara kontinyu dan makin intensif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sumbangan alumni hanya akan besar jika ia merasa bangga terhadap PTS/PTN, tetapi untuk merasa bangga kepada PT mereka harus memberikan sumbangan.

Bagaimanapun, diperlukan adanya adanya hubungan produktif antara alumni dan PT sinergi selalu mempunyai dampak lebih baik. Tetapi sinergi tidak akan terjadi tanpa niat yang baik.

Abad Cyberspace

Di tengah berbagai permasalahan tersebut, kita telah memasuki milineum ketiga ini disebut-sebut juga sebagai abad *cyberspace* ini, definisi perguruan tinggi, bahkan, perorganisasiannya perlu ditinjau kembali. Bahkan, ini mengingat perguruan tinggi virtual mulai dikembangkan. PTS/PTN dan dunia usaha pun dapat menawarkan program akademik berkualitas tinggi dan lebih fleksibel yang disebut Gravest (1999) sebagai *meta university*. Hick (1999) mengemukakan bahwa informasi sebagai komoditi dapat dipaketkan dan diantar dirumah pelanggan dalam bentuk paket-paket dalam bentuk internet. Dengan sistem itu, sebagai tugas PTS/PTN dapat digunakan dirumah. Sehingga praktik penyelenggaraan lembaga perguruan tinggi pun akan berubah.

Pada masa mendatang, fungsi kelembagaan perguruan tinggi lebih banyak sebagai *validators of degrees* atau program belajar lainnya sedangkan administrasi akademik serta kegiatan tutorial atau kuliah dapat dilakukan melalui jasa internet, seperti ilustrasi diawal tulisan ini dapat juga diselenggarakan badan lain yang diberikan kewenangan untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut, lokasi perguruan tinggi tidak lagi menjadi masalah. dengan sendirinya kontrol dan akreditasi tradisional menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dalam menghadapi perkembangan teknologi semacam itu.

Disisi lain, respon perguruan tinggi terhadap kepentingan bangsa yang lebih nyata pada pasca orde baru—perlu diintensifkan, tantangan seperti kemiskinan, disintegrasi, kerusakan lingkungan, kebodohan, kemerosotan moral dan berbagai penyakit masyarakat, sebelum sistematis direspons perguruan tinggi, baik dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian maupun kegiatan masyarakat.

Bebagian besar perguruan tinggi dalam menatap masa depan, belum jelas menetapkan kekuatannya. Apalagi untuk bersaing dengan rekannya di luar negeri yang telah mempunyai modal dasar yang lebih kuat. Mengingat banyak dan besarnya tantangan perguruan tinggi disatu pihak, terbatasnya sumberdaya yang tersedia, maka perlu usaha untuk melakukan pemikiran ulang tentang manajemen pendidikan tinggi sekarang.

V. KESIMPULAN

Tanpa terasa reformasi telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun, dan kita menyaksikan setiap rezim pemerintahan sama sekali tidak menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan agenda—agenda reformasi. Malah REFORMASI telah berubah menjadi REPOTNASI. Kesejahteraan rakyat semakin memprihatinkan, tingkat kemiskinan dan pengangguran kian meningkat, praktik korupsi semakin tumbuh subur, penegakan hukum yang tebang pilih, utang luar negeri yang terus membengkak.melahirkan raja—raja kecil atau koruptor-koruptor lokal, dan biaya pendidikan yang kian mahal.

Kendala yang dihadapi

Sistem pendidikan nasional sudah jauh dari yang diidealkan. Pencabutan UU BHP tidak serta merta menghilangkan proses kapitalisme pendidikan yang saat ini terjadi besar-besaran. "Saat ini pemerintah sudah mengganti UU BHP yang tidak berlaku tersebut dengan mengeluarkan PP no.66/2010 yang secara substansi sama dengan UU BHP. Jadi UU BHP dicabut, tetapi pemerintah menggantinya dengan PP no. 66 yang masih memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk mengutip uang kuliah setinggi-tingginya."

Jika dibiarkan, hal ini akan menyebabkan kesenjangan di kampus-kampus, yaitu muncul dua kutub mahasiswa borjuis dan mahasiswa proletar bicara soal pendidikan dan kaitannya dengan kemandirian bangsa. hakikat pendidikan untuk memanusiakan manusia tidak tercapai oleh kapitalisasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan nasional oleh pemerintah. Coba kita telaah kembali untuk melakukan *judial review* terhadap UU BHP yang akhirnya berhasil itu.

DAFTAR PUSTAKA

- George Junus Aditjondo. 2002. Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivistis dan Wartawan. Lembaga, Studi Pers dan Pembangunan.
- George Junus Aditjondo. 2003. Kebohongan-Kebohongan Negara.

Perihal Kondisi Obyektif
Lingkungan Hidup Di Nusantara

Gerry Van Klinken. 2007. Politik Lokal di
Indonesia. Yayasan Obor
Indonesia.

Muridan S.Widjojo. 2004. Bahasa Negara
Versus Bahasa Gerakan
Mahasiswa. Yayasan Obor
Indonesia.

Munawar Fuad Noer. 2009. Awakening The
Giant Membangunkan Negeri
Raksasa Yang Tertidur. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.

Nurjanah Intan. 2010. Salahkah George
Berantas Korupsi. Bangkit
Publisher. Yogja.

Syamsul Hadi. 2007. Disintegrasi Pasca
Orde Baru: Negara, Konfliklokal,
Dan Dinamika Internasional .
Yayasan Obor Indonesia.

Yudi Latif. 2005. Inteligensia Muslim dan
Kuasa: Genealogi Intelegensia
Muslim Indonesia Abad 20. Mizan
Pustaka.

Yudilatif. 2008. Indonesia Muslim
Intellegensia *And Power Institute
of Southeast Asian Studys.*